

SKRIPSI

AMIRA PARIPURNA

**PERLINDUNGAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN
DALAM KELUARGA**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2003


PERLINDUNGAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DALAM KELUARGA


SKRIPSI

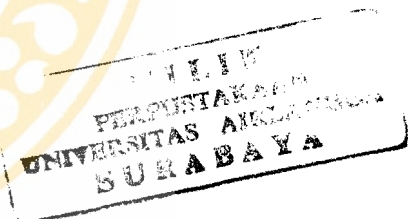
**DIAJUKAN SEBAGAI PENULISAN AKHIR PROGRAM SARJANA BIDANG
ILMU HUKUM**

DOSEN PEMBIMBING

PENULIS


Astuti, S.H., M.H.
NIP. 131 999 631


Amira Paripurna
NIM. 039914888



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

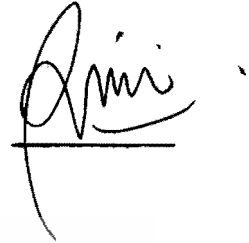
2003

Skripsi Ini Telah Diuji dan Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji

Pada Tanggal 10 Juli 2003

Panitia Penguji Skripsi

Ketua : DR. Hj. Sarwirini, S.H, M.S



Anggota : 1. Tilly A.A. Rampen S.H, M.S.



2. Astutik S.H, M.H



3. Soedarti S.H.



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Perlindungan terhadap anak yang mengalami tindak kekerasan merupakan hak yang harus diberikan kepada anak dan dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat, pengakuan terhadap hak-hak anak itu sendiri telah diakui melalui hukum internasional maupun nasional.

Perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami tindak kekerasan dalam keluarga meliputi perlindungan dari pengabaian dan pemenuhan kebutuhan anak, perlindungan dari kekerasan fisik dan perlindungan dari kekerasan seksual. Pengaturan mengenai perlindungan tersebut telah banyak terakomodir di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA), meskipun masih ada kekurangan di dalamnya yaitu belum diaturnya perlindungan hukum terhadap anak dari tindak kekerasan verbal-emosional (psikologis) dan masih banyak ketentuan-ketentuan pasal dalam UUPA yang tidak dapat diterapkan mengingat kondisi struktural dan budaya masyarakat Indonesia.

Dengan adanya perlindungan hukum bagi anak dari tindak kekerasan dalam keluarga, menunjukkan bahwa kekerasan dalam keluarga bukanlah masalah pribadi keluarga yang bersangkutan melainkan sudah menjadi masalah publik yang memungkinkan adanya intervensi dari pihak luar untuk turut serta menyelesaikan masalah kekerasan yang terjadi dalam suatu keluarga.

b. Adanya dasar hukum yang jelas untuk memberikan perlindungan terhadap anak tidak menutup kemungkinan dalam usaha pelaksanaan perlindungannya mengalami hambatan. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya perlindungan terhadap anak meliputi hambatan yang sifatnya yuridis maupun non yuridis.

Dari segi yuridis hambatan yang ditemui adalah adanya beberapa ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang belum memberikan batasan yang jelas mengenai kekerasan serta ketentuan dalam beberapa pasal yang sangat sulit untuk diterapkan di Indonesia dikarenakan budaya dan kondisi struktural masyarakat misalnya kemiskinan, begitu pula dalam segi hukum acara belum ada mekanisme yang memudahkan bagi anak untuk melaporkan atau memberikan keterangan atas tindak kekerasan yang dialaminya, belum adanya perangkat untuk pencatatan dan memberikan teguran atau sanksi awal atas terjadinya tindak kekerasan. Tidak adanya ketentuan hukum yang memberikan perlindungan terhadap korban setelah putusan pengadilan yang mengadili pelaku berlaku.

Adapun hambatan yang sifatnya non yuridis adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat bahwa tindak kekerasan dalam keluarga merupakan masalah bersama dalam masyarakat bukan lagi menjadi masalah intern keluarga yang bersangkutan, selama ini usaha untuk memberikan perlindungan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah tidak sepenuhnya dapat

terlaksana dengan baik sehingga belum dapat mencapai hasil yang maksimal, dikarenakan terbatasnya dana operasional pelaksanaan program perlindungan.

2. Saran

a. Diperlukan adanya ketentuan yang lebih jelas mengenai batasan kekerasan dalam peraturan perundang-undangan sehingga tidak hanya sebatas kekerasan yang secara fisik saja yang dapat dikategorikan sebagai tindak kekerasan tetapi juga meliputi kekerasan secara psikis (verbal-emosional).

Kerjasama antar profesi sebagai tanggung jawab sosial dan hukum yang responsif dapat digalang dalam sosialisasi upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat dilakukan serta penyebaran informasi perlindungan hukum dan bantuan bagi korban.

Pemerintah dalam membuat peraturan hendaknya menyesuaikan dengan kondisi dan budaya masyarakat sehingga dengan adanya peraturan tidak justru menjadi penyebab timbulnya faktor-faktor yang bersifat viktimogen dan kriminogen.

b. Salah satu kesulitan dalam memberikan perlindungan terhadap anak adalah deteksi secara dini kasus-kasus kekerasan terhadap anak karena ruang lingkup kejadian kasus ini adalah keluarga perlu ada upaya monitoring dan penanganan kasus yang memanfaatkan dan meminta dukungan dari lembaga-lembaga atau pihak tertentu yang fungsional dan eksis di lingkungan lokal, seperti ibu-ibu anggota PKK, kelompok Dasa Wisma, kelompok pengajian, pengurus

RT/RW, forum arisan, karang taruna, remaja masjid, forum keagamaan dan lain-lain yang betul-betul dekat dengan kehidupan sehari-hari keluarga di lingkungannya.

Pada tahap awal sudah tentu bukan penyelesaian secara yuridis yang dipergunakan, yang secara cepat menempatkan pelaku tindak kekerasan sebagai tersangka dan harus diproses secara hukum, tetapi untuk kasus-kasus yang tergolong berat seperti penganiayaan yang menimbulkan luka berat, kematian, kekerasan seksual, proses penyelesaian secara hukum harus ditegakkan.

